



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Tentang

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

TAHUN 2022



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini yang
dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp.944,428.555.500,- (*Sembilan
ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh
delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus
rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan
sebesar Rp.45.703.316.000,- (*Empat puluh lima
milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam belas
ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di

pisahkan;

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,- (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.668.750.000,- (*Tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.150.000.000,- (*empat milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.384.566.000,- (*Dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.898.725.239.500,- (*Delapan ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.879.221.790.000,- (*Delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.19.503.449.500,- (*Sembilan belas milyar lima ratus tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.016.211.798.671,- (*Satu triliun enam belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.687.342.661.129,- (*Enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.399.517.796.936,- (*Tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga enam dua rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.274.057.679.193,- (*Dua ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 12.195.060.000,- (*dua belas milyar seratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.572.125.000,- (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.176.519.612.142,- (*Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu seratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Tanah
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - Belanja Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.526.781.391,- (*Dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan*

puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.259.462.751,- *(Lima puluh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).*
- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.498.198.000,- *(Seratus tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).*
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 235.170.000,- *(Dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).*

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- *(Lima milyar rupiah).*

Pasal 11

Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.147.349.525.400,- *(Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)* yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.147.349.525.400,- *(Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)*

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 71.783.243.171,- *(tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah),* yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.76.683.243.171,- (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.683.243.171,- (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.900.000.000,- (*Empat milyar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 4.900.000.000,- (*Empat milyar sembilan ratus juta rupiah*),

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (71.783.243.171,-) (*tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran

pembiayaan direncanakan sebesar
Rp. 71.783.243.171, *(tujuh puluh satu milyar tujuh
ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh
tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);*

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Piru, 8 Januari 2022



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di P i r u

Pada tanggal, 10 Januari 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



EVERNE A. TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 0261

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2022

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat 1 menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada hasil evaluasi RKPD tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Kebijakan dan Perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam proses APBD Tahun Anggaran 2021 sering dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada Tahun 2021. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.76.683.243.171,- (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*), merupakan estimasi guna pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaanya dalam mengendalikan defisit APBD Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.703.316.000
4.1.01	Pajak Daerah	8.500.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	327.500.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	130.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	130.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	35.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	35.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	97.500.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	97.500.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	65.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	65.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	730.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	275.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	275.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	30.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	30.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	60.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	380.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	225.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	225.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	75.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	75.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	80.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	80.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.400.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.400.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.400.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	500.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	500.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	500.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.162.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.162.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.162.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	380.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	380.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	380.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	60.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	60.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.668.750.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.283.750.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.625.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	600.000.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	900.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	125.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	225.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	75.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	75.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	75.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	169.318.700
02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	165.251.100
02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	165.251.100
02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	165.251.100
02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	14.000.000
02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	14.000.000
02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	14.000.000
02.16	Belanja Modal Alat Peraga	42.820.000
02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	42.820.000
02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	42.820.000
03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.259.462.751
03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.644.321.428
03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.043.057.428
03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	225.000.000
03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.417.963.428
03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	7.229.630.000
03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000
03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	364.000.000
03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.040.534.000
03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	545.930.000
03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	20.000.000
03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.601.264.000
03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.601.264.000
03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.020.081.323
03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.020.081.323
03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.020.081.323
03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	595.060.000
03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	595.060.000
03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	595.060.000
04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.498.198.000
04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	74.881.773.000
04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.471.358.000
04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	69.397.938.000
04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	115.000.000
04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	958.420.000
04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.410.415.000
04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.410.415.000
04.02	Belanja Modal Bangunan Air	23.940.425.000
04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.134.290.000
04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	12.134.290.000
04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.631.340.000
04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.631.340.000
04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.174.795.000
04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	2.014.795.000
04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.160.000.000
04.03	Belanja Modal Instalasi	75.000.000
04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	75.000.000
04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	75.000.000
04.04	Belanja Modal Jaringan	4.601.000.000
04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.225.000.000
04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.225.000.000
04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.256.000.000
04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.256.000.000
04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	120.000.000
04.04.03.0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	120.000.000
05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	235.170.000
05.04	Belanja Modal Biota Perairan	45.170.000
05.04.09	Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)	45.170.000
05.04.09.0001	Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	45.170.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
	BELANJA MODAL	176.519.612.142
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.526.781.391
1.02	Belanja Modal Alat Besar	47.010.000
1.02.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.960.000
1.02.01.01	Belanja Modal Mesin Proses	1.960.000
1.02.01.01.0011	Belanja Modal Alat Bantu	45.050.000
1.02.01.03	Belanja Modal Pompa	37.000.000
1.02.01.03.0005	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	8.050.000
1.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Angkutan	3.420.839.200
1.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.420.839.200
1.02.02.01	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	743.746.300
1.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.677.092.900
1.02.02.01.0006	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.440.000
1.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	13.440.000
1.02.03.02	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	13.440.000
1.02.03.02.0007	Belanja Modal Alat Pertanian	198.987.000
1.02.04	Belanja Modal Alat Pengolahan	198.987.000
1.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	188.138.000
1.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	10.849.000
1.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.687.081.800
1.02.05	Belanja Modal Alat Kantor	106.715.700
1.02.05.01	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.055.400
1.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	93.660.300
1.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	877.894.900
1.02.05.02	Belanja Modal Mebel	218.201.600
1.02.05.02.0001	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	596.506.300
1.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	63.187.000
1.02.05.02.0007	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	702.471.200
1.02.05.03	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	226.155.700
1.02.05.03.0001	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	392.417.800
1.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	18.000.000
1.02.05.03.0004	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	65.897.700
1.02.05.03.0007	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	158.707.700
1.02.06	Belanja Modal Alat Studio	158.707.700
1.02.06.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	128.648.800
1.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.058.900
1.02.06.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.903.210.284
1.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran	910.000.000
1.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	910.000.000
1.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.993.210.284
1.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.993.210.284
1.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.414.266.237
1.02.08	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.602.947.700
1.02.08.01	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	238.860.000
1.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	222.930.000
1.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	4.141.157.700
1.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	36.266.200
1.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga	12.481.200
1.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	23.785.000
1.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	2.768.452.337
1.02.08.05	Alat Kesehatan Kerja	2.768.452.337
1.02.08.05.0002	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	6.600.000
1.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Umum	6.600.000
1.02.08.08.0006	Belanja Modal Komputer	2.461.168.070
1.02.10	Belanja Modal Komputer Unit	1.536.441.870
1.02.10.01	Belanja Modal Personal Computer	1.524.941.870
1.02.10.01.0002	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	11.500.000
1.02.10.01.0003	Belanja Modal Peralatan Komputer	924.726.200
1.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Jaringan	755.407.500
1.02.10.02.0004		

Lampiran 1 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor 1 Tahun 2022
Tanggal 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	8.618.400.000
02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Pelayanan Kesehatan	8.618.400.000
02.03	Belanja Pemeliharaan	8.051.694.790
02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.387.461.400
02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.505.100.000
02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	231.300.000
02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	801.650.000
02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	20.240.000
02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	363.900.000
02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	231.151.400
02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga (Home Use)	39.920.000
02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	180.000.000
02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	5.000.000
02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.200.000
02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.606.580.190
02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.029.760.190
02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	95.000.000
02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	92.100.000
02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.289.720.000
02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000
02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.653.200
02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	32.653.200
02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	25.000.000
02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.716.433.402
02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.716.433.402
02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.747.370.402
02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.333.668.000
02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.633.215.000
02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.180.000
02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.500.000
02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.500.000
02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Pertobatan	100.500.000
02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.000.000
02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.000.000
02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.000.000
05	Belanja Hibah	12.195.060.000
05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.076.960.000
05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000
05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000
05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.676.960.000
05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.676.960.000
05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000
05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000
05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000
06	Belanja Bantuan Sosial	1.572.125.000
06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	835.000.000
06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	835.000.000
06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	835.000.000
06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	537.125.000
06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	515.000.000
06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	515.000.000
06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	22.125.000
06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	22.125.000
06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000
06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000
06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	318.000.000
02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	669.200.000
02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	12.750.000
02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	583.465.000
02.02.01.0071	Belanja Lembur	88.575.000
02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.516.216.800
02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	4.000.000.000
02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	8.514.072.000
02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	502.224.800
02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	201.600.000
02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	298.320.000
02.02.03	Belanja Sewa Tanah	15.000.000
02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.000.000
02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.260.289.000
02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	145.620.000
02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	771.870.000
02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	70.000.000
02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	352.000.000
02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.000.000
02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	26.000.000
02.02.04.0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	40.000.000
02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	192.000.000
02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	967.000.000
02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	518.125.000
02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000
02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	952.674.000
02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.500.000
02.02.04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	10.000.000
02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	190.000.000
02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.165.750.000
02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	180.000.000
02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	58.800.000
02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.167.000.000
02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	115.000.000
02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	160.000.000
02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	484.950.000
02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	749.750.000
02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	734.750.000
02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	15.000.000
02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.278.783.000
02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	63.956.000
02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	35.000.000
02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	39.000.000
02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.700.000.000
02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	145.000.000
02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	70.827.000
02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	100.000.000
02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	125.000.000
02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	167.800.000
02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	47.800.000
02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	120.000.000
02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0
02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0
02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0
02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.823.894.000
02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	822.404.000
02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.820.000.000
02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	878.350.000
02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	303.140.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Code	Uraian	Jumlah
01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	201.000.000
01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.320.159.200
01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	865.000.000
01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.358.538.922
01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.891.540.000
01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	228.359.000
01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	16.362.000
01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.118.809.000
01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.410.525.000
01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	573.635.000
01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	125.000.000
01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.582.154.013
01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	39.000.000
01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	158.100.000
01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.000.000
01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	64.000.000
01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.000.000
01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	17.000.000
01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	36.000.000
01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	3.261.000
01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.700.000
01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	63.250.000
01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	110.000.000
01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	291.500.000
01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	31.200.000
02	Belanja Jasa	79.102.840.800
02.01	Belanja Jasa Kantor	43.506.958.000
02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	33.600.000
02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.502.500.000
02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.549.555.000
02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	661.950.000
02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.800.000
02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	366.150.000
02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	58.800.000
02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	188.150.000
02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.952.000.000
02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.771.718.000
02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	830.700.000
02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.251.450.000
02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	35.400.000
02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	57.900.000
02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.270.400.000
02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	433.600.000
02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.938.575.000
02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	919.520.000
02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.499.800.000
02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	198.000.000
02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.075.000.000
02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	600.000
02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	31.900.000
02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	173.000.000
02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	47.250.000
02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000
02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	200.000.000
02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.600.000
02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.500.000
02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	24.000.000
02.01.0060	Belanja Tagihan Air	95.750.000
02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.623.800.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	855.813.600
04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	855.813.600
04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.194.000
04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.194.000
04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.874.500.000
04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.874.500.000
04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.162.350.000
04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.162.350.000
04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89.588.400
04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89.588.400
04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.681.296.000
04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	162.480.800
04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.722.400
04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1.742.800
04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.515.350.000
04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.606.100.000
04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.606.100.000
05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.085.800
05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.238.000
05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.238.000
05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.600
05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.600
05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400
05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400
05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.355.200
05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.355.200
05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	233.800
05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	233.800
05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.613.600
05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.613.600
05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.800
05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.800
05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	406.000
05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	406.000
06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	496.600.000
06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	316.600.000
06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	316.600.000
06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	180.000.000
06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	180.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	274.057.679.193
01	Belanja Barang	108.059.210.201
01.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.059.210.201
01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.000.000
01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.807.800
01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.075.529.000
01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	526.536.075
01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	336.625.000
01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.885.806.976
01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	407.112.000
01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	168.480.000
01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.923.505.591
01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.538.582.047
01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	439.892.000
01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.000.000
01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	254.343.700
01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.936.696.877
01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.200.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	687.342.661.129
	Belanja Pegawai	399.517.796.936
01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	315.361.665.504
01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	236.444.023.704
01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	236.264.023.704
01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	180.000.000
01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.139.806.934
01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.139.806.934
01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.735.493.800
01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.735.493.800
01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.565.596.000
01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.565.596.000
01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.205.606.400
01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.121.863.200
01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.083.743.200
01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.910.301.914
01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.910.301.914
01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	485.901.200
01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	485.901.200
01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.523.420
01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.523.420
01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.461.929.737
01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.461.929.737
01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	608.880.089
01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	608.880.089
01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.793.602.306
01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.787.289.706
01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.312.600
01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0
01.13.0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	0
03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.272.842.032
03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34.200.000
03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.200.000
03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	24.000.000
03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.089.351.000
03.03.0001	Belanja TPG PNSD	39.089.351.000
03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.887.000.000
03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.887.000.000
03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	10.145.986.000
03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	10.145.986.000
03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.877.365.032
03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.877.365.032
03.07	Belanja Honorarium	7.942.540.000
03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.062.545.000
03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.822.995.000
03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	57.000.000
03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	296.400.000
03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	70.800.000
03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	225.600.000
04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.205.603.600
04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	590.216.400
04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	590.216.400
04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.630.800
04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.630.800
04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	106.892.400
04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	106.892.400
04.04	Belanja Uang Paket DPRD	59.022.000
04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	59.022.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000
	PENDAPATAN TRANSFER	898.725.239.500
31	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	879.221.790.000
31.01	Dana Perimbangan	787.245.165.000
31.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.565.534.000
31.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.084.671.000
31.01.01.0002	DBH PPH Pasal 21	2.019.326.000
31.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	953.675.000
31.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	695.468.000
31.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	893.568.000
31.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
31.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	561.546.470.000
31.01.02.0001	DAU	561.546.470.000
31.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.369.964.000
31.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	603.765.000
31.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	17.144.517.000
31.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.135.376.000
31.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	10.730.885.000
31.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	319.549.000
31.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.007.522.000
31.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	952.057.000
31.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	702.870.000
31.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.718.199.000
31.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.610.364.000
31.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.167.040.000
31.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.439.604.000
31.01.03.0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	2.319.600.000
31.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	6.853.643.000
31.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	12.664.973.000
31.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	121.763.197.000
31.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	41.436.090.000
31.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.520.000.000
31.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	39.089.351.000
31.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.887.000.000
31.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.145.986.000
31.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.089.000.000
31.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	55.960.000
31.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19.631.661.000
31.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	13.258.000
31.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	369.922.000
31.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.957.694.000
31.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	379.175.000
31.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	188.100.000
31.02	Dana Insentif Daerah (DID)	1.938.300.000
31.02.01	DID	1.938.300.000
31.02.01.0001	DID	1.938.300.000
31.05	Dana Desa	90.038.325.000
31.05.01	Dana Desa	90.038.325.000
31.05.01.0001	Dana Desa	90.038.325.000
32	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.503.449.500
32.01	Pendapatan Bagi Hasil	19.503.449.500
32.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.503.449.500
32.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.143.121.059
32.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.779.774.627
32.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.278.960.107
32.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.000.000
32.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.293.593.707
	Jumlah Pendapatan	944.428.555.500

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000.000
01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000
01.07.0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	50.000.000
01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	203.750.000
01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	203.750.000
02	Retribusi Jasa Usaha	860.000.000
02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	290.000.000
02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	290.000.000
02.04	Retribusi Terminal	330.000.000
02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	75.000.000
02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	255.000.000
02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000
02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	75.000.000
02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	90.000.000
02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	90.000.000
02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000
02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000
03	Retribusi Perizinan Tertentu	525.000.000
03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	225.000.000
03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	225.000.000
03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	120.000.000
03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	120.000.000
03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	180.000.000
03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	180.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.150.000.000
02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.150.000.000
02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.150.000.000
02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.150.000.000
	Lain-lain PAD yang Sah	29.384.566.000
03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000
03.01	Hasil Sewa BMD	150.000.000
03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.930.799.000
05	Jasa Giro	2.830.799.000
05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.830.799.000
05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	100.000.000
05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000
05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	3.500.000.000
07	Pendapatan Bunga	3.500.000.000
07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000
07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.775.000.000
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.775.000.000
11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.775.000.000
11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150.000.000
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	75.000.000
12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000
12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000
12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.000.000
12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	85.000.000
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	85.000.000
13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	85.000.000
13.01.0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.550.000.000
15	Pendapatan dari Pengembalian	1.550.000.000
15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.550.000.000
15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	18.993.767.000
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.993.767.000
18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.993.767.000
18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	250.000.000
21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000
21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 08 Januari 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.000.000
.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.000.000
.08.01.0005	Belanja Modal Software	190.000.000
	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
	BELANJA TRANSFER	147.349.525.400
	Belanja Bantuan Keuangan	147.349.525.400
.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	147.349.525.400
.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	147.349.525.400
.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	147.349.525.400
	Jumlah Belanja	1.016.211.798.671
	Total Surplus/(Defisit)	(71.783.243.171)
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.683.243.171
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.683.243.171
.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	76.683.243.171
.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	76.683.243.171
.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	76.683.243.171
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.683.243.171
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.900.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	4.900.000.000
.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.900.000.000
.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.900.000.000
.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.900.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.900.000.000
	Pembiayaan Netto	71.783.243.171

Bupati Seram Bagian Barat

TIMASTUS AKERINA